



SIARAN PERS
Nomor: HM-6/SU04/3/2022

BPKP Menjadi Andalan Presiden untuk Mengawasi Penerapan Program P3DN

JAKARTA (25/3/2022) - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

"Saya minta BPKP dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawasi transaksi yang ada dan (memberi) laporan harian kepada saya," ujar Presiden saat memberikan arahan tentang Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, serta pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Jumat 25/3.

Jokowi meminta seluruh peserta acara yang hadir baik itu Menteri, Kepala Lembaga, TNI, Polri, Kepala Daerah serta pimpinan BUMN untuk bersama-sama mengoptimalkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam melakukan belanja.

Tahun ini, kata Jokowi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan untuk membelanjakan anggarannya sebanyak Rp400T untuk belanja Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk produk dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Sekarang kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya *gak* banyak-banyak," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dirinya yakin, jika semua kementerian, lembaga, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan BUMN benar-benar meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, maka akan dapat membuka 2 juta lapangan pekerjaan baru dan peluang investasi akan semakin besar. "Kalau kita *beli* produk dalam negeri, meloncat nanti pertumbuhan ekonomi kita. Kalau sebelum bulan Mei sudah tercapai maka akan berdampak ke mana-mana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar mengatakan telah meminta BPKP bersama dengan LKPP, Kejaksaan Agung, serta Polri untuk turut serta melakukan pengawasan dan menciptakan *early warning system* terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

"Terima kasih BPKP yang dengan LKPP sudah melakukan kerja sama. Audit BPKP untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan," ucap Luhut.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, untuk mewujudkan arahan Presiden terkait afirmasi produk dalam negeri, maka perlu adanya kolaborasi seluruh *stakeholders* antar Kementerian/Lembaga. "BPKP siap bersinergi dan berkolaborasi dalam (bentuk) pengawasan untuk bisa mendukung tercapainya target Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia (melalui) peningkatan TKDN serta penggunaan PDN dan UMKM sesuai yang diminta Presiden," tegasnya.

Narahubung Media:

Riyanti Ridzki Dewi

Koordinator Komunikasi dan Informasi

M: 0812 1834 6638 // W: www.bpkp.go.id